

Analisis Kepemimpinan dan Kebijakan Politik Utsman Bin Affan dalam Pemerintahan Islam

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
<p>Sri Yulyanti Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 231340159.sriyulyanti@uinbanten.ac.id</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>
<p>Achmad Maftuh Sujana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten maftuhsujana@gmail.com</p>	
<p>Ita Anita Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 231340163.ita@uinbanten.ac.id</p>	
<p>Amalia Nabilah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 231340165.amalia@uinbanten.ac.id</p>	
<p>Musfiroh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 231340172.musfiroh@uinbanten.ac.id</p>	
<p>Fatyah Alifatunnisa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 231340185.fatyah@uinbanten.ac.id</p>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Yuyanti, S., Sujana, A. M., Anita., I., Nabila, A., Musfiroh., Alifatunnisa, F. (2025). Analisis Kepemimpinan dan Kebijakan Politik Utsman Bin Affan dalam Pemerintahan Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 4641-4646.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan dan kebijakan politik Khalifah Utsman bin Affan dalam pemerintahan Islam, serta menelaah relevansinya terhadap model kepemimpinan modern yang berlandaskan nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang lembut, dermawan, dan visioner. Kebijakan politiknya meliputi ekspansi wilayah Islam, kodifikasi dan standarisasi mushaf Al-Qur'an, pembangunan infrastruktur publik, serta reformasi administrasi pemerintahan. Ia juga memberikan perhatian besar terhadap bidang pendidikan dengan membangun madrasah, memperkuat sistem pembelajaran, dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun kepemimpinannya diwarnai tuduhan nepotisme dan konflik politik pada akhir masa pemerintahannya, secara keseluruhan Utsman bin Affan berhasil memperkuat stabilitas pemerintahan dan memperluas peradaban Islam. Kepemimpinan Utsman merepresentasikan perpaduan antara idealisme religius dan

pragmatisme politik yang relevan sebagai inspirasi bagi model kepemimpinan Islam masa kini.

Kata Kunci: Kepemimpinan Islam, Kebijakan Politik, Utsman bin Affan, Pemerintahan Islam, Sejarah Peradaban

Abstract

This study aims to analyze the leadership and political policies of Caliph Uthman ibn Affan within the framework of Islamic governance and to explore their relevance to modern leadership models based on justice, consultation (shura), and public welfare. Using a qualitative method with a historical approach through library research, the study examines various academic sources including books, journals, and previous scholarly works. The findings reveal that Uthman ibn Affan was a gentle, generous, and visionary leader. His political policies included the expansion of Islamic territories, the codification and standardization of the Qur'an, public infrastructure development, and administrative reforms. Uthman also paid great attention to education by establishing madrasas, improving learning systems, and supporting the advancement of scientific knowledge. Although his leadership faced accusations of nepotism and internal political conflicts in its later years, overall, Uthman successfully strengthened governmental stability and expanded the Islamic civilization. His leadership represents a synthesis of religious idealism and political pragmatism, serving as a valuable model for contemporary Islamic leadership.

Key Words: Islamic Leadership, Political Policy, Uthman ibn Affan, Islamic Governance, Civilization History

A. Pendahuluan

Kepemimpinan dalam Islam memiliki peranan penting dalam membentuk tatanan sosial yang berkeadilan, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, konsep kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai kekuasaan politik, tetapi juga sebagai amanah untuk menegakkan keadilan dan menuntun umat menuju kemaslahatan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sistem pemerintahan Islam berkembang melalui lembaga khilafah yang mengedepankan prinsip syura (musyawarah), 'adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan umat). Masa Khulafaur Rasyidin menjadi cerminan penerapan nilai-nilai tersebut secara nyata. Di antara empat khalifah pertama, Khalifah Utsman bin Affan menempati posisi yang istimewa karena kepemimpinannya membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam.

Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok pemimpin yang berakhlak lembut, dermawan, dan memiliki sifat malu yang tinggi. Dalam masa pemerintahannya yang berlangsung selama dua belas tahun (23–35 H/644–656 M), ia menghadapi berbagai tantangan seiring meluasnya wilayah Islam dan meningkatnya kompleksitas urusan negara. Namun, dengan karakter sabar dan penuh kehati-hatian, Utsman mampu mengelola dinamika politik dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah. Menurut Muzakki dan Tyas (2022), kebijakan politik yang diterapkannya meliputi perluasan wilayah kekuasaan, standarisasi mushaf Al-Qur'an, pengangkatan pejabat negara, serta pembangunan infrastruktur publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan sekaligus menjaga persatuan umat.

Hidayat dan Istianah (2025) menegaskan bahwa masa kepemimpinan Utsman bin Affan merupakan tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Melalui kebijakan kodifikasi mushaf, ia berupaya mencegah perpecahan di kalangan umat. Langkah tersebut menunjukkan visi kepemimpinan yang tidak hanya administratif, tetapi juga spiritual dan visioner. Meskipun pada paruh akhir kepemimpinannya muncul berbagai tuduhan seperti nepotisme dan konflik politik, Utsman tetap mempertahankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam mengambil keputusan, bahkan hingga akhir hayatnya. Sikap ini menggambarkan integritas seorang pemimpin sejati yang menjadikan amanah sebagai bentuk ibadah.

Sementara itu, penelitian Desri et al. (2023) menggambarkan gaya kepemimpinan Utsman sebagai kombinasi antara kepemimpinan demokratis dan profetik, di mana ia selalu melibatkan para sahabat dalam musyawarah, memberi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, serta bersikap terbuka terhadap kritik. Gaya kepemimpinan ini berpadu dengan keteladanan

moral yang kuat, seperti dijelaskan Husna et al. (2023), bahwa Utsman senantiasa memperhatikan kebutuhan rakyatnya, menjunjung tinggi keadilan sosial, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Utsman tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada pengabdian dan kesejahteraan umat. Lebih lanjut, Samudera et al. (2025) menyebutkan bahwa pemerintahan Utsman bin Affan memperlihatkan kemajuan signifikan dalam bidang administrasi dan politik. Ia membentuk struktur pemerintahan yang lebih tertata, mengatur keuangan negara secara sistematis, serta memperluas jaringan ekonomi dan dakwah ke berbagai wilayah. Seluruh kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Utsman berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan pemerintahan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam karakter kepemimpinan dan kebijakan politik Khalifah Utsman bin Affan dalam pemerintahan Islam, serta menelaah bagaimana nilai-nilai kepemimpinannya yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah dapat menjadi inspirasi bagi model kepemimpinan modern yang menekankan keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis yang dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai kepemimpinan dan kebijakan politik Utsman bin Affan. Metode studi pustaka dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelusuran data melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah terdahulu tanpa melibatkan observasi lapangan (Sugiyono, 2019). Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan isi sumber, membandingkan pandangan antar penulis, serta menafsirkan hasil kajian untuk memperoleh pemahaman yang objektif tentang sistem pemerintahan Islam pada masa Utsman bin Affan (Syamsuddin, 2019).

C. Hasil dan Pembahasan

Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang senantiasa menerapkan musyawarah dalam mengambil keputusan sebagai bentuk kedekatannya dengan rakyat. Prinsip keadilan, pemberian penghargaan (reward), serta pendekatan persuasif selalu menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Salah satu wujud nyata kebijakan penting Utsman ialah pengumpulan mushaf Al-Qur'an menjadi satu kesatuan yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Meskipun demikian, sejumlah kebijakan yang diambilnya menuai kritik, terutama tuduhan nepotisme, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyusun konspirasi politik dengan tujuan menjatuhkannya. Tuduhan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk intrik politik dari kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kekuasaan.

Utsman bin Affan, sahabat dekat Rasulullah SAW, merupakan khalifah ketiga dalam sejarah peradaban Islam. Semasa Rasulullah masih hidup, Utsman dikenal sebagai penulis wahyu dan sekretaris pribadi Nabi, serta berperan penting dalam pembukuan Al-Qur'an secara sistematis pada masa kekhalifahannya. Hubungan kekerabatannya dengan Rasulullah berasal dari garis keturunan yang sama pada 'Abdu Manaf, di mana Rasulullah berasal dari Bani Hasyim, sedangkan Utsman dari Bani Umayyah—dua suku yang sebelum Islam sering bersaing dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh sebab itu, keislaman Utsman dianggap sebagai peristiwa yang bersejarah, heroik, dan berpengaruh besar bagi masyarakat Quraisy.

Selama pemerintahannya, Utsman melakukan sejumlah perubahan dan kebijakan, termasuk mengangkat beberapa anggota keluarganya untuk menempati jabatan publik strategis. Kebijakan ini menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan menjadi salah satu penyebab munculnya gerakan oposisi yang berujung pada pemberontakan dan pembunuhan dirinya. Utsman diangkat sebagai khalifah pada usia 70 tahun dan memimpin selama 12 tahun (23–35 H/644–656 M), yang terbagi menjadi dua fase: enam tahun pertama berjalan stabil dan penuh keberhasilan, melanjutkan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab; sedangkan enam tahun terakhir ditandai dengan kekacauan dan gejolak politik.

Sifat pribadi Utsman yang lembut dan pemalu membuatnya sering kesulitan bersikap tegas, terutama dalam pengangkatan pejabat yang berasal dari kerabat dekatnya. Hal inilah yang menimbulkan kesan bahwa ia bersikap kurang objektif. Namun demikian, pada masa awal pemerintahannya, kekhalifahan Islam mencapai puncak kejayaan, dengan wilayah yang meluas

dan masyarakat yang hidup dalam keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan sebelum akhirnya muncul konflik internal akibat pemberian kekuasaan berlebih kepada Bani Umayyah, yang menimbulkan ketidakpuasan dan pemberontakan dari berbagai pihak.(Akmalia, 2018)

Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, bidang pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dan menunjukkan berbagai kemajuan. Beberapa aspek yang menonjol di antaranya adalah penyebaran ajaran Islam, pengorganisasian pendidikan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Utsman memberikan perhatian besar terhadap pendidikan sebagai sarana dakwah dan pembangunan umat. Melalui pendirian madrasah-madrasah, beliau berupaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam dan memperkuat keilmuan umat di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, Utsman bin Affan juga dikenal sebagai tokoh yang mengatur sistem pendidikan secara lebih terstruktur. Ia memperkenalkan model pembelajaran yang terorganisir di lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya, dengan tujuan meningkatkan mutu dan efektivitas proses belajar mengajar. Tidak hanya berfokus pada pendidikan agama, Utsman juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan umum, termasuk bidang-bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu sosial. Dukungan terhadap para ulama dan ilmuwan menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu periode penting dalam perkembangan intelektual dunia Islam.

Khalifah Utsman pun memberikan perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. Ia membangun fasilitas belajar seperti madrasah, perpustakaan, dan tempat belajar lainnya untuk menunjang kegiatan ilmiah. Selain pendidikan formal, beliau juga menaruh perhatian pada literasi masyarakat umum, dengan mendorong umat Islam agar mampu membaca dan menulis. Upaya ini diiringi dengan pengawasan terhadap kurikulum pendidikan, agar materi pelajaran tetap berlandaskan nilai-nilai Islam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dari berbagai langkah tersebut, tampak bahwa Utsman bin Affan berperan besar dalam memajukan dunia pendidikan Islam, baik dalam aspek kelembagaan, keilmuan, maupun pembangunan moral dan spiritual umat.

Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek kekuasaan politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial terhadap umat. Prinsip ini tampak jelas dalam figur Khalifah Utsman bin Affan, pemimpin ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Ia bukan sekadar penguasa politik, melainkan sosok yang memainkan peran penting dalam membangun dan memperluas peradaban Islam (Iramadhania et al., 2024). Dikenal karena kedermawannya, kebijaksanaannya dalam pengambilan keputusan, serta pandangan visionernya terhadap kemajuan umat, Utsman menjadi contoh pemimpin yang berpengaruh dan inspiratif. Selama dua belas tahun masa kepemimpinannya, beliau berhasil membawa masyarakat Arab menuju transformasi besar yang menjadikan dunia Islam stabil dan disegani (Black, 2006).

Ketika nilai-nilai kepemimpinan seperti yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan tidak lagi diikuti, timbul berbagai krisis dalam kehidupan sosial dan politik umat. Ketiadaan teladan kepemimpinan yang berintegritas dapat memicu melemahnya keadilan sosial, meningkatnya kesenjangan kekuasaan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap otoritas. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang lembut, dermawan, dan menjunjung tinggi persatuan serta penyebaran Islam dengan cara yang damai dan inklusif. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka muncul kecenderungan otoritarianisme, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik horizontal. Tanpa pemimpin yang berpegang pada nilai keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sebagaimana dicontohkan Utsman, masyarakat rentan terhadap perpecahan, munculnya dominasi kepentingan kelompok, serta melemahnya institusi keumatan karena hilangnya arah dan keteladanan moral.

Selama masa pemerintahannya, Utsman bin Affan berhasil mencapai berbagai kemajuan penting yang menjadi dasar bagi perkembangan Islam di masa berikutnya (Hayani et al., 2025). Salah satu pencapaiannya yang paling monumental adalah pengkodifikasian Al-Qur'an menjadi mushaf standar, yang berperan besar dalam menjaga keaslian dan keseragaman bacaan umat Islam di seluruh wilayah. Selain itu, beliau juga melanjutkan ekspansi wilayah Islam, memperluas cakupan dakwah dan pengaruh pemerintahan Islam. Namun demikian, masa kepemimpinan Utsman juga menghadapi sejumlah tantangan internal dan eksternal. Fitnah dan pemberontakan yang muncul di akhir pemerintahannya menjadi bukti betapa kompleksnya mengelola kekuasaan dalam wilayah Islam yang semakin luas dan beragam (Mariyono, 2024).

Khalifah Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun (23-35 H/644-656 M) dan masa pemerintahannya memiliki sejumlah kebijakan penting yang berpengaruh besar dalam sejarah Islam. Dalam upayanya memperkuat kekhalifahan, Utsman melakukan ekspansi wilayah yang signifikan sebagai respons terhadap faktor ideologi, perubahan lingkungan, dan kebutuhan

pemerintahan yang semakin besar. Ia dikenal memperkuat armada laut sebagai inovasi strategis untuk mempertahankan serta memperluas wilayah kekuasaan Islam, sekaligus menjaga jalur perdagangan dan komunikasi antarprovinsi.

Selain ekspansi wilayah, Utsman juga melaksanakan kodifikasi serta standarisasi mushaf Al-Qur'an, yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani, agar bacaan dan penulisan Al-Qur'an di seluruh wilayah Islam seragam dan terjaga kemurniannya. Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesatuan umat dan menghindarkan perpecahan akibat perbedaan bacaan.

Dalam pemerintahannya, Utsman juga menerapkan prinsip musyawarah (syura) sebagai dasar pengambilan keputusan, namun pada praktiknya ia mulai mengangkat banyak anggota keluarganya sebagai pejabat penting, terutama gubernur di berbagai wilayah kekuasaan. Kebijakan ini menimbulkan tuduhan nepotisme dan menjadi sumber konflik politik serta ketidakpuasan di kalangan rakyat. Pemberontakan dan penentangan terhadap kebijakan ini berkembang terutama pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Namun, sisi lain kebijakan tersebut juga merupakan usaha pragmatis untuk menjaga stabilitas dan efisiensi pemerintahan terhadap wilayah yang sangat luas.

Utsman melakukan pembangunan fisik yang signifikan seperti perluasan Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Selain itu, dia menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur dan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mempermudah aktivitas sosial-keagamaan umat Islam. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat jaringan sosial dan keagamaan. Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara teratur melalui lembaga Baitul Mal yang diorganisasi dengan baik. Utsman juga membentuk sistem keamanan yang mencakup kepolisian dan pembentukan angkatan laut untuk menjaga ketertiban dan stabilitas politik di pusat maupun wilayah-wilayah kekuasaan.

Meskipun demikian, masa pemerintahan Utsman tidak terlepas dari krisis internal akibat tuduhan nepotisme dan intrik politik, yang memicu ketegangan sosial dan politik hingga berakhir pada pembunuhan beliau. Banyak sejarawan berpendapat bahwa tuduhan tersebut sebagian merupakan strategi politik dari para pesaing yang ingin merebut kekuasaan, sehingga konteks politik pada masa itu sangat kompleks.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Utsman bin Affan merupakan jembatan penting antara idealisme pemerintahan para khalifah awal dengan pragmatisme pengelolaan sebuah imperium yang luas dan kompleks. Kebijakannya memperlihatkan upaya adaptasi terhadap tantangan zaman sekaligus memicu dinamika politik yang signifikan dalam sejarah Islam.

D. Kesimpulan

Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu periode penting dalam sejarah pemerintahan Islam yang menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai spiritual, moral, dan politik. Sebagai khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin, Utsman dikenal sebagai pemimpin yang lembut, dermawan, dan berjiwa visioner. Melalui kebijakan-kebijakannya seperti ekspansi wilayah Islam, kodifikasi dan standarisasi mushaf Al-Qur'an, pembangunan infrastruktur publik, serta reformasi administrasi pemerintahan, beliau berhasil memperkuat fondasi pemerintahan Islam dan memperluas pengaruh peradaban Islam di berbagai wilayah.

Selain keberhasilannya di bidang politik dan pemerintahan, Utsman juga berperan besar dalam pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pendirian madrasah, peningkatan sistem pembelajaran, serta dukungan terhadap ulama dan ilmuwan menjadikan masa pemerintahannya sebagai salah satu fase penting dalam kemajuan intelektual dunia Islam. Namun demikian, tuduhan nepotisme dan konflik politik pada akhir pemerintahannya menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengelola kekuasaan di wilayah yang semakin luas dan beragam.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Utsman bin Affan mencerminkan keseimbangan antara idealisme religius dan pragmatisme politik. Keteladanan beliau dalam menjunjung tinggi keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial memberikan pelajaran berharga bagi model kepemimpinan Islam kontemporer. Nilai-nilai tersebut tetap relevan hingga kini, terutama dalam membangun pemerintahan yang berlandaskan moralitas, keadilan, dan kesejahteraan umat.

E. Referensi

- Desri, S., Nazaruddin, E., Ikhsan, S., Syadiq, A., & Hutasuhut, N. N. (2023). Gaya Kepemimpinan Utsman Bin Affan Pada Masa Kepemimpinannya. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(3), 8255-8262. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Haekal, M. H. (2013). Usman bin Affan (Terj. A. Audah). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Hasbullah. (2015). Kebijakan pendidikan dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Hidayat, T., Istianah, Aprilianti, T., Syafe'i, M., & Anwar, S. (2025). Sejarah Peradaban Islam Masa Kepemimpinan Khalifah 'Uṣmān Bin 'Affān Raḍi Allāhu 'Anhu. Tarikh: Journal of Islamic History & Civilization, 1(1), 64-83. <https://doi.org/10.61630/trjihc.v1i1.5>
- Karim, M. A. (2009). Sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Katsir, I. (2012). Perjalanan hidup empat khalifah Rasul yang agung (Terj. A. I. Al-Atsari). Jakarta: Darul Haq.
- Samudera, M. A., Rizzaky H., M. O., Musyafa, M. Z., Madan Saputra, A. R. W., & Latua, A. (2025). Sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan. Jurnal Psikososial dan Pendidikan, 1(1), 75-81.
- Samudera, M. A., Rizzaky, M. O., Musyafa, M. Z., Pradana, A. R. W., & Latua, A. (2025). Sistem Pemerintahan pada Masa Utsman Bin Affan. Psikosopen: Jurnal Psikososial dan Pendidikan, 1(1), 75-78.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddin, M. (2019). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak.
- Tyas, N. R., & Muzakki, M. (2022). Kebijakan Politik Khalifah Utsman Bin Affan Menurut Buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Kurikulum 2013. Jurnal PAIDA, 1(2), 130-133.
- Wahyuni, S., Lestari, A. R., Mulyani, M., Zuhri, M. T., Munawaroh, N., & Masripah. (2025). Sejarah Kepemimpinan Utsman Bin Affan: Analisis Peranannya dalam Perkembangan Peradaban Islam. Action Research Journal Indonesia (ARJI), 7(2), 706-720. <https://journal.nahnuinisiatif.com/index.php/ARJI/article/view>